BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah tentang arah politik luar negeri Australia memiliki alur yang cukup panjang. Di mulai dari keberhasilan ekspedisi yang dilakukan oleh Kapten James Cook pada tahun 1770. James Cook berhasil berlabuh di Botany Bay (sekarang New South Wales), kemudian wilayah ini dijadikan tempat pengasingan bagi para narapidana Inggris. Hal ini terjadi karena berakhirnya perang kemerdekaan Amerika Serikat di tahun 1783 membuat Inggris tidak dapat lagi mendeportasi para tahanan ke Amerika Serikat, sedangkan jumlah tahanan terus bertambah. Pada 26 Januari 1788, 11 kapal Inggris berhasil mendarat di Botany Bay dengan membawa penumpang sebanyak 1487. Diantara penumpang tersebut 759 adalah narapidana dan tahanan politik. Sisanya adalah tentara dan petugas rumah tahanan. Banyaknya orang Inggris yang mendarat pada hari itu membuat 26 Januari ditetapkan sebagai '*Australia Day*' (Sabari, 1991). Sejak itu Australia resmi menjadi tanah jajahan Inggris.

Tahun 1790-an pemukim bebas mulai berdatangan, yaitu warga sipil yang bukan narapidana bermigrasi ke Australia. Pengiriman narapidana ke Australia masih berlangsung hingga tahun 1868. Pada tahun 1850 Inggris mengeluarkan undang – undang yaitu *Australian Colonies Government Act* (Siboro, 2012). Dengan adanya undang – undang ini Inggris memberikan kesempatan bagi koloni

– koloni yang ada di Australia untuk mengatur sendiri koloninya tanpa memikirkan hubungannya dengan koloni lainnya. Namun koloni – koloni ini tetap berstatus sebagai koloni dari Australia. Koloni – koloni yang terbentuk antara lain Western Australia, South Australia, New South Wales, Victoria, Tasmania dan Queensland. Seiring berjalannnya waktu pengaturan koloni secara sendiri – sendiri ini menimbulkan kepentingan yang tumpang tindih. Selain itu perlunya keseragaman peraturan guna membatasi datangnya imigran, pembentukan pertahanan keamanan Australia dari negara – negara besar, seperti Jerman, Rusia, Perancis, dan Jepang yang sudah menampakkan ancamannya dengan mendirikan koloni – koloni di pulau – pulau dekat Australia, dan perlunya bangsa Australia memiliki rasa nasionalisme terhadap jati diri bangsa (Hamid, 1999). Kemudian pada akhir abad ke-19 diadakan konvensi untuk membahas penyatuan koloni. Hingga pada 1900 pemerintah Inggris mengeluarkan Undang – Undang yang mengesahkan konstitusi Australia. Pada 1 Januari 1901 konstitusi itu mulai berlaku dan juga merupakan hari terbentuknya *Commonwealth of Australia*.

Politik luar negeri Australia pada awal berdiri masih diatur oleh Inggris. Hal ini tidak menjadi masalah karena saat itu Australia menganggap bahwa kepentingan luar negerinya sama dengan Inggris. Disamping itu, Australia juga belum siap jika menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Australia masih sangat bergantung pada Inggris. Hingga pada tahun 1907, Australia, Kanada dan Selandia Baru memperoleh status dominion (Siboro, 2012) yang diberikan oleh Inggris. Dengan adanya status ini berarti Australia memiliki kemerdekaan penuh untuk mengatur urusan dalam dan luar negerinya meski masih tetap meamandang Raja/Ratu Inggris sebagai Raja/Ratunya. Namun hingga

pecahnya Perang Dunia I, Australia belum memiliki perwakilan diplomatik di luar anggota *British Commonwealth of Nations*.

Ketika Inggris ikut dalam Perang Dunia I, Australia ikut membantu melawan Jerman dan sekutunya. Austraia berhasil mengalahkan Jerman di kawasan Pasifik dengan didukung oleh 2000 pasukan. Hal ini menjadi pengalaman berharga bagi Australia di Perang Dunia I. Tidak kurang dari 330.000 pasukan Australia yang dikirimkan ke Timur Tengah dan Eropa untuk membantu Inggris melawan Jerman, Austria dan Turki. (Siboro, 2012)

Berakhirnya Perang Dunia I menyebabkan dampak positif terhadap pandangan luar negeri Australia. Bangsa Australia patut berbangga dengan kemampuan pasukannya dalam Perang Dunia I. Pasalnya kemampuan dari pasukan Australia ini tidak dapat diragukan lagi karena memiliki kualitas yang sebanding dengan negara – negara yang sudah lama berdiri. Rasa kebanggaan ini yang kemudian menyadarkan bangsa Australia, bahwa mereka patut disejajarkan dengan bangsa lain. Selain itu, keikutsertaan Autralia dalam perjanjian *Versailles* merupakan bukti bahwa dunia internasional mengakui keberadaan Australia. Ditambah dengan penyerahan daerah bekas jajahan Jerman ke Australia oleh Liga Bangsa – Bangsa menambah bukti kepercayaan dunia Internasional akan Australia. Namun sampai tahun 1940 Australia masih tetap mengandalkan Inggris dalam urusan luar negeriya. Dengan adanya pangkalan angkatan laut Inggris di Singapura menurut Australia sudah dapat menjamin keamanan dari serangan musuh di bagian utara. Hingga pada tahun 1941 ketika Jepang menjatuhkan bomnya di Pearl Harbour yaitu pangkalan laut Amerika Serikat dan kemudian merebut wilayah kekuasaan Amerika yaitu Filipina. Kawasan Asia Tenggara saat

itu hampir dikuasai oleh Jepang. Hal ini menyebabkan Australia merasa keamanannya terancam ditambah Inggris yang kurang bisa membantu Australia saat itu karena sedang menghadapi Jerman dan Italia. Kemudian Australia memutuskan untuk meminta bantuan Amerika Serikat sebagai perlindungan dari serbuan Jepang. Sejak saat itu Amerika Serikat menjadi sekutu bagi Australia.

Ancaman keamanan kembali terjadi ketika Perang Dingin, dimana negara komunis mulai menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Amerika Serikat merupakan teman yang pas bagi Australia untuk dapat membendung pengaruh tersebut. Dalam kerjasamanya untuk mempertahankan keamanan Australia bersama dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru membentuk sebuah pakta yaitu ANZUS. Selain itu, Australia bersama Amerika Serikat terus giat untuk membendung pengaruh komunis. Di samping itu Australia juga tidak dapat terus bergantung pada Amerika Serikat.

Peristiwa yang dilalui Australia saat Perang Dunia II menyadarkannya bahwa kepentingan yang dimiliki olehnya berbedaa dengan kepentingan negara – negara barat karena secara geografis mereka memiliki letak yang berbeda dan musuh yang dihadapi pun berbeda. Ditambah dengan perubahan dari lingkungan strategisnya yang mulai tak aman lagi, banyaknya terjadi pertikaian dan ketegangan politik. Kemudian Australia memutuskan untuk mengganti kebijakan pertahanannya menjadi *Self-Defence Strategy* (Alami, 2006). Adanya pergantian kebijakan pertahanan ini membuat Australia harus merumuskan kembali kebijakan yang sesuai dengan perubahan kondisi dan jati diri bangsa Australia. Paul Dibb yang merupakan seorang mantan personel Departemen Pertahanan Australia ditugaskan oleh Menteri Pertahanan Australia saat itu, Kimbeazley

untuk mengevaluasi dan memberikan masukan tentang kemampuan Australia di bidang pertahanan.

Paul Dibb melalui *Dibb's Report* mengusulkan empat lapis strategi penangkalan pertahanan Australia. Pada lapis pertama, adanya prioritas pengawasan sejauh 1000 – 1500 mil ke luar wilayah Australia dimaksudkan untuk mendeteksi para penyusup di wilayah laut dan udara. Lapis kedua, ditekankan pada kemampuan dan kekuatan laut dan udara untuk melakukan penyerangan terhadap ancaman yang melintas di wilayah laut dan udara Australia. Lapis ketiga, lebih fokus pada kemampuan bertahan untuk mencegah musuh yang mendekat ke wilayah penting di antaranya di jalur pelayaran Australia. Lapis keempat, mengandalkan *mobile ground forces* guna menumpas ancaman yang berhasil melewati laut dan udara yang dianggap membahayakan aset-aset penting dan pemukiman penduduk. Namun pernyataan Paul Dibb dinilai terlalu defensif dan isolasionis terlepas dari itu masukan Paul Dibb tersebut dijadikan dasar tinjauan kekuatan pertahanan Australia. (Alami, 2006)

Pada 1987, setahun setelah *Dibb's Report*, dikeluarkanlah Buku Putih Pertahanan Australia "*The Defence of Australia*". Dalam Buku Putih ini lebih ditekankan pada kerjasama keamanan yang lebih dekat dengan kawasan dan juga menegaskan kembali pentingnya aliansi militer. Buku Putih ini juga mengadopsi usulan dari Paul Dibb, terbukti dengan adanya empat lapis strategi penangkalan. Namun Buku Putih ini lebih bersifat ofensif. Kemudian pada tahun 1994, dikeluarkannya Buku Putih Pertahanan Australia "*Defending Australia*", dengan lebih menekankan pada kerjasama pertahanan dengan negara – negara tetangga kurang menekankan pada ikatan pertahanan Australia dan Amerika Serikat.

Saat itu Australia lebih fokus pada ancaman dari bagian utara, sehingga Australia lebih berfokus pada negara – negara Asia Tenggara, Timur dan Pasifik Selatan. Perlahan hegemoni Australia dan Selandia Baru mulai terlihat di Pasifik Selatan. Hal ini dikarenakan Australia dan Selandia Baru merupakan negara yang besar di kawasan tersebut dan memiliki kekuatan yang cukup dibandingkan dengan negara lainnya. Australia dan Selandia Baru memiliki kontribusi yang besar dalam menjaga stabilitas keamanan di Pasifik Selatan diantaranya yaitu mengatasi pemberontakan di Papua New Guini dan konflik internal di Kepulauan Solomon.

Pada tahun 1997 Australia memutuskan untuk bekerja sama dengan Afrika Selatan, India, Oman, Singapura, Kenya dan Mauritius untuk mendirikan *Indian Ocean Rim Association* (IORA). IORA merupakan sebuah organisasi internasional yang menaungi negara-negara di kawasan Samudera Hindia dalam kerjasama di bidang ekonomi, keamanan dan keselamatan maritim, dan pendidikan serta kebudayaan. Awalnya organisasi ini merupakan gagasan bersama antara Afrika Selatan, India dan Australia. Hingga pada tanggal 29-31 Maret 1995 diadakan pertemuan untuk membahas lebih lanjut tentang kerjasama ekonomi diantara negara – negara Samudera Hindia.

Australia yang sebelumnya hanya berfokus untuk menjaga kestabilan di Pasifik Selatan kini membangun kerjasama dengan negara – negara di Samudera Hindia. Sebenarnya kepentingan apa yang dimiliki oleh Australia untuk bergabung mendirikan IORA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penyusunan skripsi ini adalah : Mengapa Australia ikut mendirikan *Indian Ocean Rim Assosiation* bersama negara – negara di Kawasan Samudera Hindia?

C. Kerangka Pemikiran

Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tertentu untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain. Untuk menjelaskan kepentingan Australia dalam IORA tahun 1997 – 2007, penulis menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul "*Introduction of International Politic*".

Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkain proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta hal-hal yang mempengaruhinya. William D. Coplin menggambarkan teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara diambil. Pembuatan Keputusan Luar Negeri dibentuk atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin sendiri, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Ketiga konsiderasi tersebut yaitu; pertama, kondisi politik dalam negeri, kedua adalah

kapabilitas ekonomi dan militer dan yang terakhir adalah konteks internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. (Coplin, 2003) Berikut adalah model teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri:

Gambar 1.1 Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri Menurut William D. Coplin

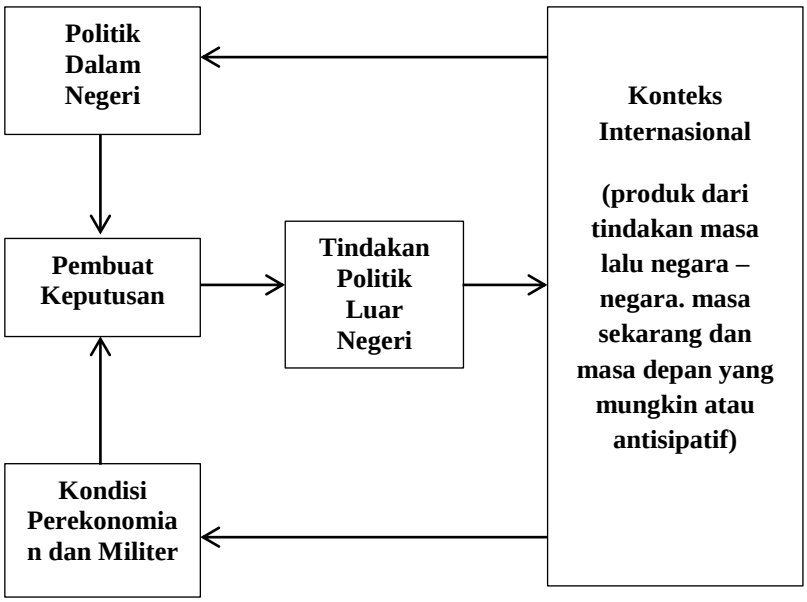

Sumber : Coplin, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algezindo.

1. **Kondisi Politik Dalam Negeri**

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisikondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk

mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasan Coplin disebut dengan *policy influencer*. Interaksi tersebut terangkai dalam sistem pengaruh kebijakan.

Lebih jauh Coplin menambahkan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pengambil keputusan dengan *policy influencer*. *Policy influencer* merupakan sumber dukungan bagi penguatan rezim tertentu dalam suatu negara. Hal tersebut berlaku bagi semua sistem pemerintahan, baik yang demokrasi maupun yang autokrasi. Para pemimpin negara sangat bergantung pada kemauan rakyatnya untuk memberi dukungan. Dukungan dapat berupa kesetiaan angkatan bersenjatanya, keuangan dari para pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilihan umum dan lain - lain. Rezim yang memerintah sangat membutuhkan dukungan tersebut untuk membuat kedudukannya lebih pasti dan kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran sehingga menguatkan legitimasinya.

Dalam konteks Australia yang memiliki dua partai mayoritas dengan perspektif yang berbeda dan masing – masing partai memiliki kekuatan yang seimbang. Kemudian arahan politik luar negeri Australia pun akan berbeda tergantung dari partai mana perdana menteri berasal. Tiga pilar tradisi politik luar negeri Australia menurut pendapat Petrov (2008 dalam Darmawan, 2012), yaitu :

a. Tradisi Menzies (Partai Liberal) yang digambarkan sebagai tradisi realistik, pragmatis, dan berpusat pada kekuatan. Disini pandangan Menzies difokuskan pada kenyataan keterisolasian Australia dapat diatasi dengan menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat.
b. Tradisi Evatt (Partai Buruh) yang memperlihatkan gambaran nasinalis dan internasionalis, sebab Evatt berpedoman organisasi internasional (dalam hal

ini PBB) merupakan forum yang cukup efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Arah pilar kedua ini adalah kekuatan dan nilai kebebasan dan pemahaman tentang identitas diri suatu bangsa.

c. Tradisi Spender dan Casey (Partai Liberal) menekankan pada pentingnya wilayah regional dan kerjasama aktif dengan Asia.

Sampai saat ini ketiga pilar tersebut masih relevan dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan politik luar negeri Ausralia, meskipun penekanannya sangat ditentukan oleh kondisi dari partai manakah perdana menteri Australia berasal.

2. Kapabilitas Ekonomi dan Militer

Ekonomi dan militer merupakan dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran ekonomi suatu negara. Dan sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militernya. Kedua variabel ini juga yang menurut Coplin menjadi modal utama negara-negara Eropa menjajah Asia dan Eropa. Perusahaan-perusahaan dagang Eropa datang tidak hanya membawa misi ekonomi, namun lebih kepada penaklukan wilayah dengan dukungan kekuatan militer yang lebih kuat.

Dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, maka negara tertentu akan lebih aktif dalam “panggung” politik internasional. Khusus militer, Coplin menerangkannya dengan 3 kriteria utama, yaitu; jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya (Coplin, 2003). Ketiga kriteria tersebut merupakan pembeda kekuatan-kekuatan militer suatu negara. Dengan merujuk

pada ketiga kriteria tersebut, pengambil keputusan luar negeri dapat melihat sejauh mana militer akan efekif. Dengan kata lain, kemampuan Ekonomi dan Militer sebuah negara dapat mempengaruhi posisi tawar (bargaining position) dimata negara lain. Sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan Ekonomi dan Militer merupakan dua unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Singkatnya, semakin baik perekonomian dan militer suatu negara, maka akan semakin mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya. (Coplin, 2003)

Australia sebagai Negara yang diapit dua samudera dan berada di lokasi yang strategis di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan menggantungkan perekonomiannya pada perdagangan internasional. Samudera Hindia sebagai jalan penghubung untuk menyalurkan perdagangan internasionalnya ke benua Afrika, dan benua Asia terutama wilayah anak benua India dan Asia Tenggara. Tingginya angka perompakan di wilayah perairan samudera Hindia membuat Australia harus mencari cara agar perdagangan internasionalnya ke negara – negara samudera Hindia terganggu dan menyebabkan kerugian. Pada tahun 1997 dicetuskan organisasi internasional yang bertujuan untuk mengurangi perompakan yang ada di wilayah samudera Hindia dan Australia menjadi salah satu pendirinya. Ini salah satu tujuan mengapa Australia bergabung yaitu untuk melindungi jalur perdagangannya dari perompak. Dengan bergabungnya Australia ke dalam *Indian*

Ocean Rim Association sekaligus bertujuan untuk memperkuat pertahanannya dengan kerjasama dengan negara – negara yang berada dekat dengannnya.

3. Konteks Internasional

Konteks internasional menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara dan ilmuwan realis telah memberikan penjelasannya (Coplin, 2003). Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat digunakan untuk memetakan negara mana yang kawan dan yang lawan.

Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan internasional setiap negara merupakan wilayah yang ditempatinya berkaitan dengan lokasi dan hubungannya dengan negara-negara lain dalam sebuah sistem politik internasional. Hubungan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi dan politik. Namun geografi lebih memainkan peranan yang penting, walaupun tidak yang terpenting. Faktor georgrafi merupakan yang utama dalam terciptanya organisasi lintas negara seperti Uni Eropa, NATO, ASEAN dll. Sehingga tercipta hubungan-hubungan politik dan ekonomi antar sesama negara anggota. Pengambil kebijakan luar negeri harus melihat itu dalam membuat keputusan. (Coplin, 2003)

Australia sebagai negara yang berada diantara Samudera Hindia dan Pasifik memiliki banyak kesempatan untuk bekerja sama secara regional dengan beberapa negara. Sesuai dengan kepentingan nasionalnya yaitu menjaga stabilitas keamanan

di sekitar wilayahnya. Australia mencoba turut aktif dalam organisasi internasional.

Berikut adalah skema dari aplikasi teori pengambilan keputusan oleh Wiliam D. Coplin.

Gambar 1.2 Aplikasi Teori Pengambilan Keputusan William D. Coplin

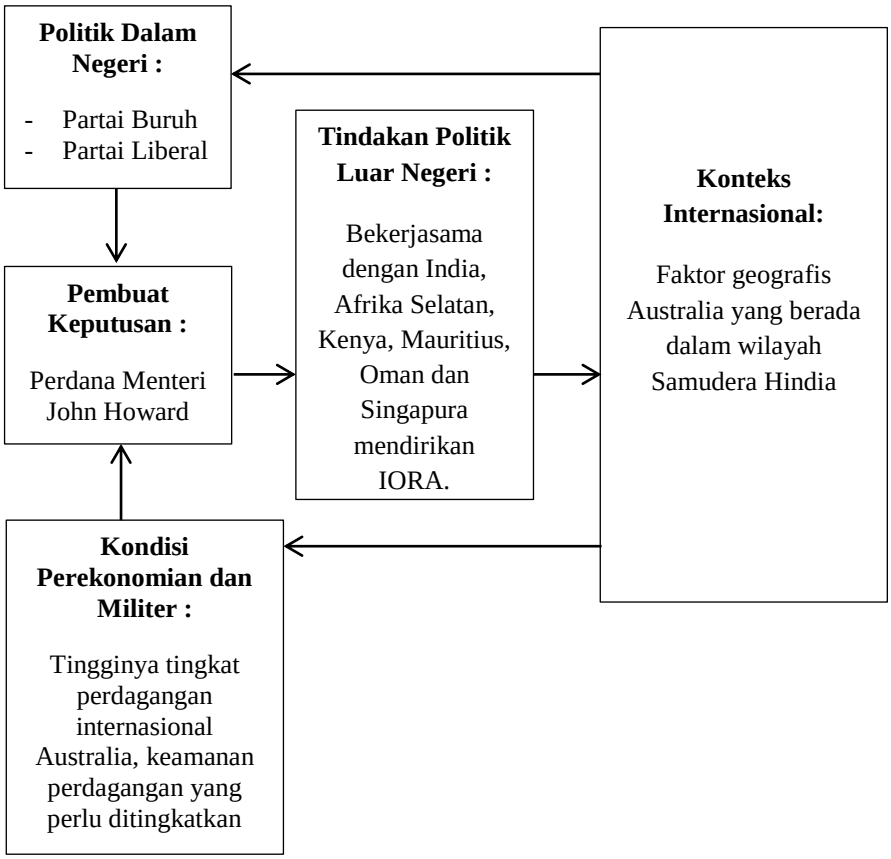

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

D. Hipotesa

Australia bergabung dengan *Indian Ocean Rim Assosiation* (IORA) karena adanya tiga pertimbangan, yaitu :

1. Kondisi politik dalam negeri Australia yang saat itu dipimpin oleh John Howard membawa Autralia untuk berkomitmen kepada region sebagai prioritas tertinggi kebijakan luar negerinya.
2. Kondisi Ekonomi dan Militer :

   a. Keuntungan dalam perekonomian dari adanya perdagangan dengan negara – negara di kawasan Samudera Hindia

   b. Australia berusaha untuk melindungi jalur perdagangannya ke kawasan Samudera Hindia dari perompak.
3. Dalam konteks internasional keputusan Australia untuk bergabung dengan IORA dipengaruhi oleh geografis yang berada dalam Samudera Hindia yang menjadikannya bagian dari Samudera Hindia dan keuntungan – keuntungan ekonomis yang dimiliki oleh Australia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, dan lebih menekankan kepada model historis yakni penelaahan serta sumber – sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Metode ini juga merupakan cara menetapkan fakta dan mencapai simpulan mengenai hal-hal yang telah lalu, yang dilakukan secara sistematis

dan objektif oleh ahli sejarah dalam mencari, mengevaluasi dan menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari masalah baru tersebut.

2. **Metode pengumpulan data**

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan atau bersifat sekunder dengan pengumpulan berbagai literatur yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, berita, dokumen pemerintah, ataupun sumber online termasuk juga website resmi serta laporan maupun tulisan – tulisan yang relevan dengan penelitian yang akan dibahas dan mendukung dalam analisis kepentingan Australia dalam *Indian Ocean Rim Association*.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak terlalu jauh pembahasannya maka penulis memberikan batasan waktu. Batasan penelitian dalam penulisan ini dimulai pada tahun 1997 sejak *Indian Ocean Rim Association* resmi didirikan dan pada tahun 2007 merupakan tahun terakhir masa kepemimpinan John Howard sebagai perdana menteri Australia. Penulis akan lebih berfokus pada masa kepemimpinan John Howard dalam mengambil keputusan luar negerinya. Namun tidak menutup kemungkinan pembahasan penulisan di luar dari jangkauan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang masalah dijelaskan

mengenai sumber masalah dari penelitian. Rumusan masalah merupakan fokus dari penelitian yang dilakukan. Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini akan dibahas dalam kerangka teori.

Pada Bab II membahas tentang dinamika politik luar negeri Australia, dimana akan dijelaskan tentang sejarah politik luar negeri Australia. Sejarah Australia sejak sebelum Perang Dunia I, diantara Perang Dunia I dan II, serta setelah Perang Dunia II. Selain itu, penulis membahas mengenai arah politik luar negeri Australia pada masa kepemimpinan John Howard.

Pada Bab III dipaparkan mengenai tantangan dan potensi yang ada di Samudera Hindia. Selain itu penulis juga menjelaskan tentang sejarah berdirinya IORA.

Bab IV menjelaskan faktor – faktor kepentingan Australia dalam *Indian Ocean Rim Association*. Pada bab ini, diuraikan tentang aplikasi dari teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri menurut William D. Coplin. Keputusan luar negeri yang dibuat oleh John Howard tersebut dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional.

Bab V berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini.